

# Rekomendasi Rencana Aksi untuk Mencapai Kesetaraan Gender dalam Perfilman Indonesia

Disusun oleh  **KAF&IN**  
Pengkaji Film Indonesia

Untuk



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



From  
the People  
of Japan

Dalam koordinasi dengan



BADAN  
PERFILMAN  
INDONESIA

Naskah untuk Konsultasi Pemangku Kepentingan 21-27  
September 2020

## Ringkasan Eksekutif

Naskah ini melaporkan serangkaian rekomendasi rencana aksi untuk mencapai kesetaraan gender dalam perfilman Indonesia sebagai respon terhadap hasil penelitian data terpilah-jender yang dikomisikan oleh UNESCO kepada KAFEIN. Penelitian data terpilah-jender menunjukkan bahwa ada ketimpangan gender dalam perfilman Indonesia. Rekomendasi ini dirumuskan dengan menggunakan metode ‘teori perubahan’ dan ‘analisis pemangku kepentingan’, yang dilakukan oleh 4 anggota tim inti KAFEIN berdasarkan penelitian awal dari konferensi virtual “Perempuan dalam Film dan Perfilman Indonesia” (<https://kafein.or.id/en/filmgender/>) dengan diskusi lebih jauh melalui dua FGD daring, satu dengan anggota pengurus Badan Perfilman Indonesia dan satu dengan dosen-dosen sekolah film Indonesia. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dokumen ini adalah naskah rekomendasi untuk konsultasi publik yang akan diselenggarakan dari tanggal 21-27 September 2020.

Tujuan utama dirumuskan sebagai “mencapai kesetaraan gender dalam perfilman Indonesia” dan kami kemudian membaginya lagi dalam 3 sasaran karena kompleksitas masalah. Untuk mencapai setiap sasaran, kami merekomendasikan beberapa aksi, capaian, dan mengidentifikasi pihak yang berpotensi untuk memimpin kegiatan yang diusulkan. Asumsi di balik perumusan setiap sasaran juga dijelaskan. Terdapat total sepuluh aksi yang kami rekomendasikan dalam rencana aksi.

Sasaran pertama adalah memperbaiki kondisi kerja produksi dan kegiatan perfilman Indonesia untuk membuatnya menjadi ideal, aman dan inklusif bagi semua gender termasuk mereka yang berasal dari kelompok marjinal karena kondisi kerja yang buruk telah menghalangi perempuan dan kelompok marjinal lainnya untuk bekerja dalam perfilman. Untuk sasaran ini kami merekomendasikan untuk mengembangkan sebuah panduan praktik terbaik untuk pekerjaan perfilman melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melibatkan asosiasi profesi untuk membuat mereka menyetujui sebuah usaha yang terkoordinasi, dan membuat kelompok dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual.

Sasaran kedua adalah untuk mendorong partisipasi kelompok gender termarginalisasi dan kelompok termarginalisasi lainnya dalam produksi dan kegiatan perfilman Indonesia dengan menyediakan insentif dan menciptakan ruang-ruang baru bagi mereka untuk belajar dan menghasilkan karya untuk menyeimbangkan ketimpangan. Kami merekomendasikan agar data terpilah-jender diperluas untuk memasukan data-data interseksional, dipelihara, diperbaharui secara rutin, dan dipublikasikan untuk menjaga visibilitas ketimpangan-ketimpangan yang ada agar dapat diadvokasi atau dilakukan penyesuaian kebijakan. Kami juga merekomendasikan agar ada lebih banyak lokakarya kolaborasi antara pembuat-pembuat film yang sudah mapan dengan pembuat film baru dari kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan juga membuat event-event untuk memamerkan karya-karya mereka dengan menggunakan berbagai wadah termasuk wadah digital yang telah membuka kesempatan besar untuk memamerkan karya.

Sasaran ketiga adalah untuk membawa perspektif gender dalam pembuatan film karena memiliki representasi yang seimbang tidak menjamin bahwa isi film akan menjadi sensitif terhadap gender maupun beragam. Kami merekomendasikan untuk mengadvokasi agar pendanaan untuk film

dengan uang rakyat memasukan perspektif jender sebagai bahan pertimbangan. Kami juga merekomendasikan untuk memulai transformasi pendidikan film dengan pertama-tama membuat panduan tentang bagaimana mencapai kurikulum dan lingkungan yang responsif terhadap jender dalam program studi film. Selain dari itu, kami merekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran dengan melakukan pelatihan jender untuk para pemangku kepentingan perfilman dan membuat katalog ulasan film Indonesia yang membahas tentang sensitivitas jender dan keberagaman.

Kami melakukan analisis pemangku kepentingan untuk mendefinisikan strategi pelibatan agar rekomendasi rencana aksi ini dapat direalisasikan. Analisis kami menunjukkan bahwa Badan Perfilman Indonesia (BPI) akan menjadi pemain kunci yang dapat menggerakkan rekomendasi ini karena memiliki otoritas, representasi dan jaringan kerja. Sedangkan asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Profesi (ASPROFI), Asosiasi Program Studi Film dan Televisi (ASPROFI) dan Asosiasi Pengkaji Film (KAFEIN) dapat dilibatkan dalam melakukan banyak kegiatan jika ada dukungan pendanaan dari donor atau pemerintah. Maka dari itu, donor juga merupakan pemain kunci dalam rencana aksi ini.

Organisasi-organisasi pemerintah yang terkait dengan aksi ini seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Komisi X dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dan juga pemerintah daerah adalah pemangku kepentingan yang harus diberikan informasi, diadvokasi dan dilibatkan dalam kegiatan. Jalur komunikasi harus dibuka terhadap subyek dari rencana aksi ini yaitu pekerja film perempuan, penyintas kekerasan seksual, dosen-dosen film, mahasiswa film, dan pekerja film secara umum. Mereka harus dapat mengkomunikasikan masukan dan keluhan mereka dan mereka juga perlu menerima respon dari input mereka. Penonton film Indonesia perlu dilibatkan secara strategis dengan menginformasikan mereka tentang masalah secara umum, kemajuan dan capaian melalui media massa dan media sosial.

Kami mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan/atau dukungan terhadap rekomendasi ini melalui e-mail kami [kafein.id@gmail.com](mailto:kafein.id@gmail.com).

# Pendahuluan

## Latar Belakang

KAFEIN di bawah sebuah proyek yang dikomisi oleh UNESCO telah melakukan pengumpulan dan analisis terhadap data terpilih jender industri perfilman Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengawasi sebuah pembicaraan mengenai kebijakan terkait status kesetaraan jender dalam industri film Indonesia dan berharap bahwa dalam jangka panjang industri film Indonesia memiliki kegiatan berkala untuk mengumpulkan data terpilih jender untuk mempertahankan kesetaraan jender dalam arus utama kebijakan. Kami telah menampilkan hasil pengumpulan dan analisis data dalam sebuah laporan yang terpisah. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa ada ketimpangan jender di dalam perfilman Indonesia dan bahwa tindakan lebih lanjut harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan jender dalam perfilman Indonesia. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam industri jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Dimana ada partisipasi perempuan, partisipasi tersebut terbatas pada beberapa posisi saja seperti penulis naskah dan artistik yang menawarkan fleksibilitas lebih. Data juga menunjukkan sesuatu hal yang lebih menarik. Partisipasi perempuan jauh lebih tinggi di ketika ada di sekolah film. Ini artinya, perempuan ikut sekolah film namun kemudian memutuskan untuk tidak berkarir di industri film. Dokumen ini bertujuan untuk memformulasikan sebuah rekomendasi untuk rencana aksi sebagai respon dari data-data tersebut. Rekomendasi ini akan terbuka untuk komentar dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

## Tujuan

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan

- 1) merekomendasikan serangkaian rencana aksi kepada pemangku kepentingan film Indonesia untuk mencapai kesetaraan jender dalam perfilman Indonesia,
- 2) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpotensi untuk mengakomodasi dan melakukan aksi yang direkomendasikan,
- 3) melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan rencana aksi untuk memperoleh dukungan dan keterlibatan mereka dengan harapan meningkatkan kemungkinan direalisasinya aksi-aksi ini

## Metodologi

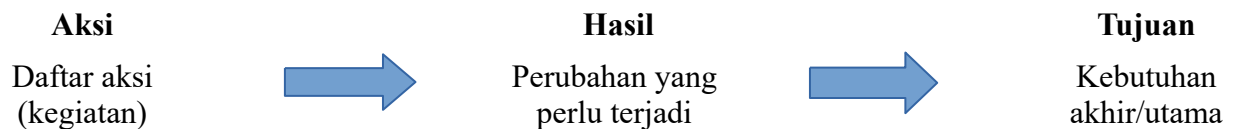
Untuk merumuskan rencana aksi ini, kami akan menggunakan dua alat yang biasa digunakan dalam proyek-proyek pembangunan internasional. Yang pertama adalah teori perubahan, dan yang kedua adalah analisis pemangku kepentingan.

## Teori Perubahan

Teori perubahan adalah sebuah alat yang digunakan oleh banyak organisasi yang bekerja dalam bidang pembangunan internasional. Ini adalah sebuah alat yang memungkinkan penggunaannya untuk menjelaskan bagaimana sebuah hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan menciptakan

perubahan-perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di dalam proyek. Ini menunjukkan runutan pemikiran logis di balik sebuah rumusan proyek. Kami menimbang bahwa alat ini dapat bermanfaat untuk menjamin bahwa rencana aksi yang kami rumuskan memiliki kontribusi secara logis pada tujuan besarnya.

Membuat teori perubahan biasanya dimulai dengan memperjelas atau memutuskan tujuan akhir atau tujuan besar yang pengguna inginkan. Setelah itu, pengguna merunut ke belakang dan memutuskan perubahan-perubahan apa yang perlu terjadi agar tujuan besar dapat dicapai. Perubahan-perubahan ini disebut hasil. Aksi atau kegiatan kemudian dirumuskan untuk membuat perubahan atau hasil yang kita inginkan tadi bisa terjadi.



Tim inti di dalam KAFEIN terdiri dari Dr. Tito Imanda, Dr. Evi Eliyanah, Sazkia Noor Anggraini S.Ant, S.Sn, M.Sn, difasilitasi oleh konsultan pembangunan internasional Rahayu Siti Harjanthi, MA merumuskan naskah awal dari tujuan utama dan sasaran-sasaran untuk teori perubahan sebagai titik mula diskusi dan juga untuk merancang kegiatan konsultasi. Naskah ini dirumuskan melalui riset awal dan masukan dari berbagai presentasi di konferensi virtual “Perempuan dalam film dan perfilman Indonesia” (<https://kafein.or.id/en/filmgender/>). Berdasarkan sasaran-sasaran yang kami identifikasi, kami lalu melakukan dua kelompok diskusi terfokus (focus group discussion/ FGD) dengan beberapa pemangku kepentingan film Indonesia yang paling relevan untuk mengembangkan teori perubahannya. Tujuan utamanya telah kami setujui sebagai “Mencapai kesetaraan jender dalam perfilman Indonesia” sementara sasaran awalnya adalah: I. Kesempatan yang setara bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya, II. Perfilman Indonesia menjadi tempat kerja yang aman dari kekerasan dan pelecehan seksual dan III. Perspektif jender terintegrasi dalam pembuatan film. Kami memberikan sebuah pengantar terhadap proyeknya dan juga mempresentasikan hasil data terpilah jender sebelum memulai diskusi.

FGD diselenggarakan selama 2 jam melalui pertemuan daring dengan Zoom. FGD pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan beberapa anggota Badan Perfilman Indonesia untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan industri secara umum dan kebijakan, khususnya terkait dengan sasaran I, II dan dukungan pembiayaan untuk sasaran III. Pesertanya terdiri dari: Dewi Umayra (Wakil Ketua), Alex Sihar (Ketua Bidang Advokasi Kebijakan), Gunawan Paggaru (Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan), Agung Sentausa (Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Film), dan HM Bagiono (Ketua Bidang Perlindungan dan Mediasi). Dari FGD ini perumusan sasaran I dan II disesuaikan untuk merespon kekhawatiran peserta terhadap kata-katanya yang seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok marjinal secara aktif dihalangi sebagai peserta perfilman Indonesia padahal halangannya sebetulnya berasal dari budaya dan struktural. Keprihatinan utama sebetulnya adalah kondisi kerja dalam produksi dan kegiatan perfilman tidak aman dan kondusif untuk siapapun, apalagi perempuan. Maka dari itu, rencana aksi semestinya fokus untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kami akhirnya memutuskan untuk menambahkan juga beberapa kegiatan yang akan mendorong partisipasi kelompok marjinal karena kami berpendapat bahwa perbaikan kondisi kerja tidak akan serta merta membuat perempuan dan kelompok marjinal lain tiba-tiba berpartisipasi dalam kegiatan perfilman.

FGD kedua dilaksanakan pada 12 September 2020 bersama anggota asosiasi sekolah film dan dosen-dosen sekolah film untuk membicarakan soal pendidikan film, terkait dengan sasaran III

meskipun ini juga berkontribusi pada sasaran I dan II juga. Pesertanya terdiri dari: Arief Sulistiono, Dara Bunga Rembulan, Naswan Iskandar, Lala Sentyapuri, Nan Achnas, Kus Sudarsono. Kami memberikan pengantar mengenai proyek, presentasi data terpilah jender dan juga rekomendasi rencana aksi yang dihasilkan FGD pertama. Peserta sebagian besar setuju tentang perlunya kurikulum yang responsif terhadap jender, proporsi jender yang lebih seimbang antara dosen-dosen film dan juga perlunya studi terhadap isi film-film Indonesia terkait dengan sensitivitas jendernya. Peserta juga setuju bahwa perbaikan secara menyeluruh terhadap kode etik industri yang memasukan sensitivitas jender dan anti kekerasan serta anti pelecehan seksual akan membuat mereka lebih mudah untuk menurunkan nilai-nilai tersebut kepada siswa karena itu akan menjadi standar industri.

Hasil akhir dari rencana aksi dalam bentuk teori perubahan akan dipaparkan di bab berikutnya.

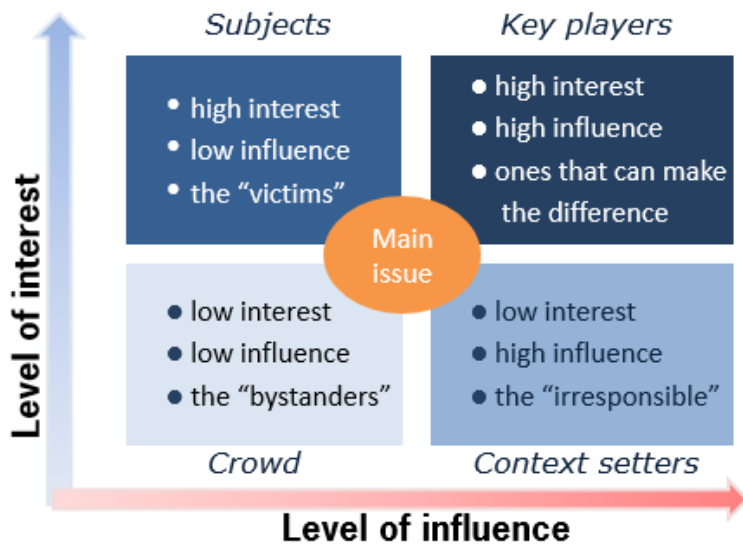
## **Analisis Pemangku Kepentingan**

Salah satu alasan penting analisis pemangku kepentingan digunakan dalam merancang dan mengelola program pembangunan internasional adalah ia membantu mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang harus didorong untuk berpartisipasi dalam program atau mengidentifikasi kelompok yang rentan yang perlu dilindungi dari dampak negatif. Analisis pemangku kepentingan juga berguna untuk menjamin bahwa pemangku kepentingan yang relevan, yang dapat menentukan kesuksesan program sudah dipertimbangkan secara masak.

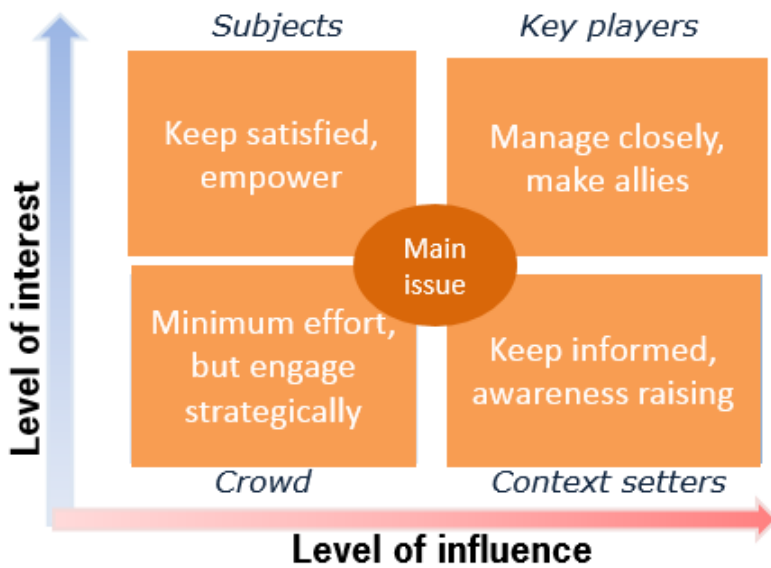
Tiga langkah mendasar untuk membuat analisis pemangku kepentingan adalah

- mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka,
- menilai tingkat pengaruh mereka, dan
- mengidentifikasi strategi pelibatan untuk setiap kelompok pemangku kepentingan.

Kelompok pemangku kepentingan kemudian akan diposisikan dalam matriks kepentingan dan pengaruh. Matriks memiliki garis x yang menunjukkan tingkat pengaruh dan y yang menunjukkan tingkat kepentingan. Saat semua pemangku kepentingan diposisikan dalam matriks, secara umum kita dapat mengelompokkan mereka dalam empat kelompok sebagai berikut:



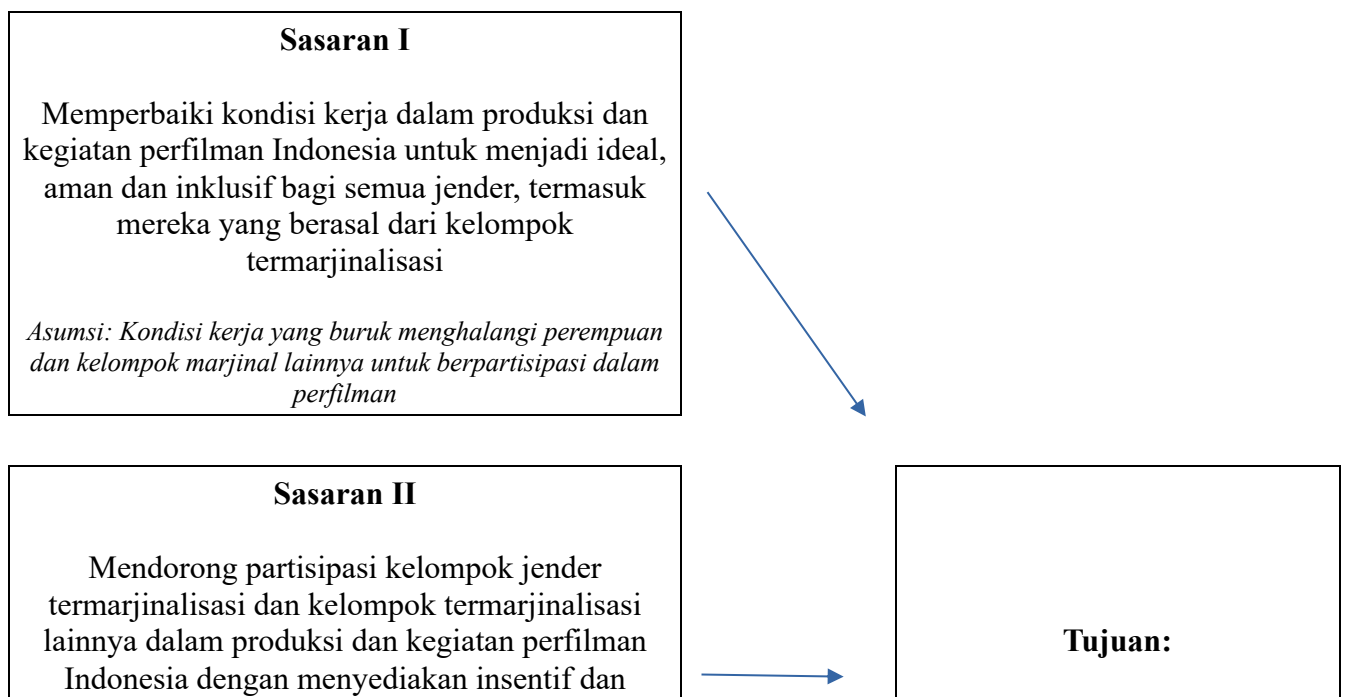
Panduan umum ini akan memberikan kita acuan tentang bagaimana cara pelibatan setiap kelompok pemangku kepentingan



Analisis pemangku kepentingan dilakukan oleh tim inti KAFEIN dengan menggunakan pengetahuan kami sebaik-baiknya mengenai pemangku kepentingan tersebut dan menganalisisnya berdasarkan panduan di atas.

## Rekomendasi Rencana Aksi untuk Mencapai Kesetaraan Gender dalam Perfilman Indonesia

Ini adalah naskah pertama rekomendasi rencana aksi yang akan dibawa kepada seluruh pemangku kepentingan film untuk konsultasi sebagai hasil dari pemikiran tim inti KAFEIN dengan masukan dari Badan Perfilman Indonesia dan dosen-dosen sekolah film. Teori perubahan ini melihat bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam perfilman, ada 3 perubahan besar yang harus dicapai yaitu perbaikan kondisi kerja untuk menjadi lebih aman dan inklusif, dorongan untuk gender termarginalisasi dan kelompok lain untuk berpartisipasi dalam perfilman dan integrasi perspektif gender dalam pembuatan film.





membuka ruang-ruang baru bagi mereka untuk belajar dan berkarya

*Asumsi: Perbaikan kondisi kerja tidak akan serta merta membuat perempuan dan kelompok termarginalisasi berpartisipasi dalam perfilman, perlu ada dorongan secara aktif untuk membawa mereka masuk*

Mencapai Kesetaraan Jender dalam Perfilman Indonesia

### Sasaran III

Perspektif jender terintegrasi dalam pembuatan film Indonesia

*Asumsi: Keseimbangan jender tidak menjamin film yang dibuat sensitif jender, maka dari itu perlu usaha lebih untuk membawa perspektif jender dalam*

Sasaran pertama yang merupakan perbaikan kondisi kerja untuk menjadi lebih ideal, aman dan inklusif dapat dicapai melalui tiga aksi yang menghasilkan tiga keluaran. Kami ingin melihat pemangku kepentingan duduk bersama dan menyetujui definisi kondisi kerja yang ideal, aman dan inklusif dan melihat mereka berusaha untuk mencapainya. Kami juga merekomendasikan pelibatan asosiasi profesi perfilman untuk meminta dukungan mereka terhadap usaha ini. Kemudian dalam usaha untuk memitigasi adanya kekerasan maupun pelecehan seksual yang sudah terjadi, kami merekomendasikan dibentuknya kelompok dukungan untuk para penyintas.

#### Aksi 1

Membuat sebuah panduan praktik terbaik yang mendefinisikan kondisi kerja yang ideal, aman dan inklusif bagi seluruh pekerja termasuk untuk kelompok yang rentan dan termarginalisasi serta merumuskan strategi untuk perbaikan kebijakan ketenagakerjaan perfilman melalui sebuah proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

#### Hasil A

Pemangku kepentingan menyetujui sebuah praktik terbaik untuk produksi dan kegiatan perfilman yang harus mereka usahakan untuk tercapai, baik secara sukarela dan/atau mengadvokasinya untuk menjadi sebuah hukum kebijakan ketenagakerjaan

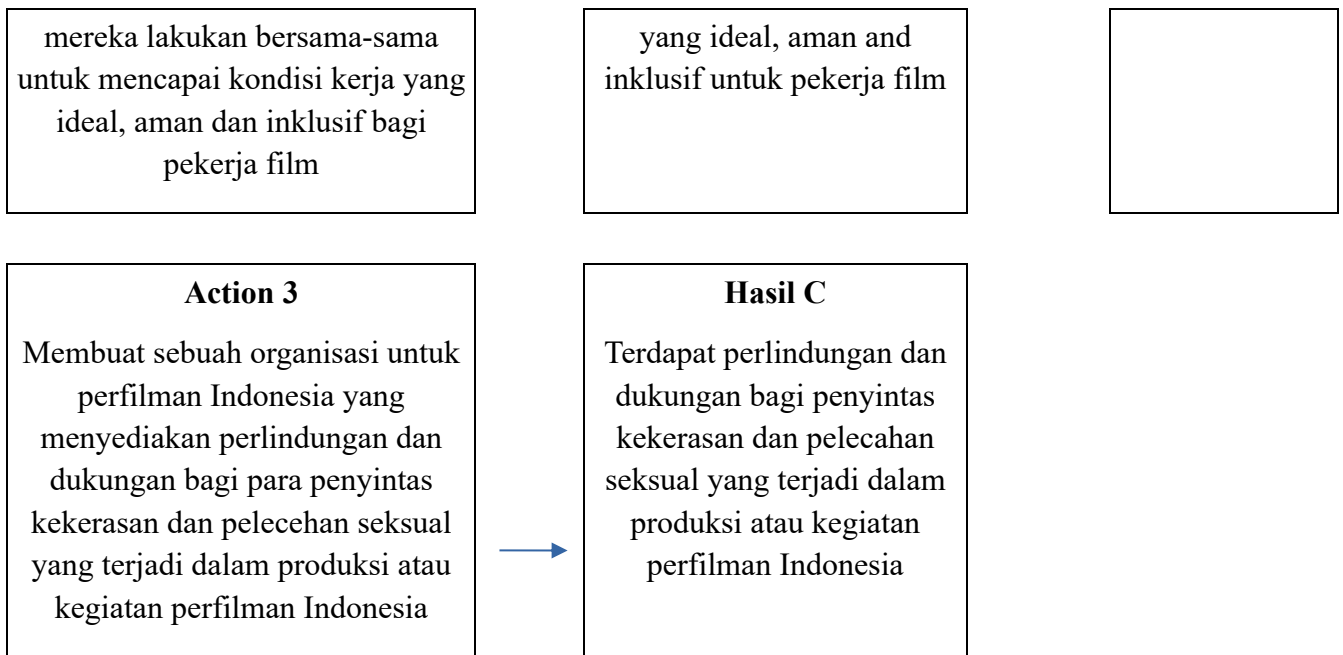
#### Aksi 2

Memfasilitasi pertemuan antara asosiasi-asosiasi profesi perfilman Indonesia untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan apa yang dapat

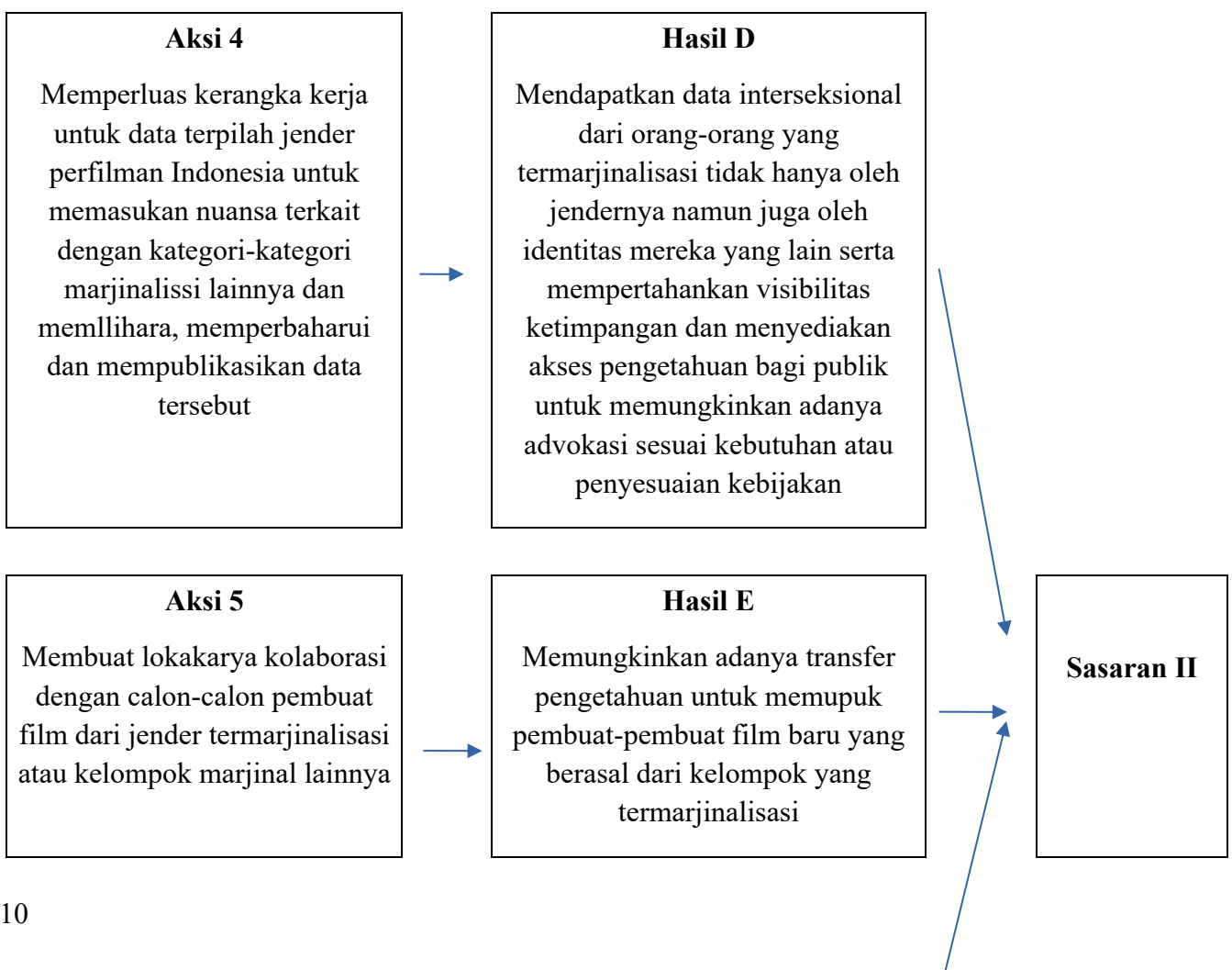
#### Hasil B

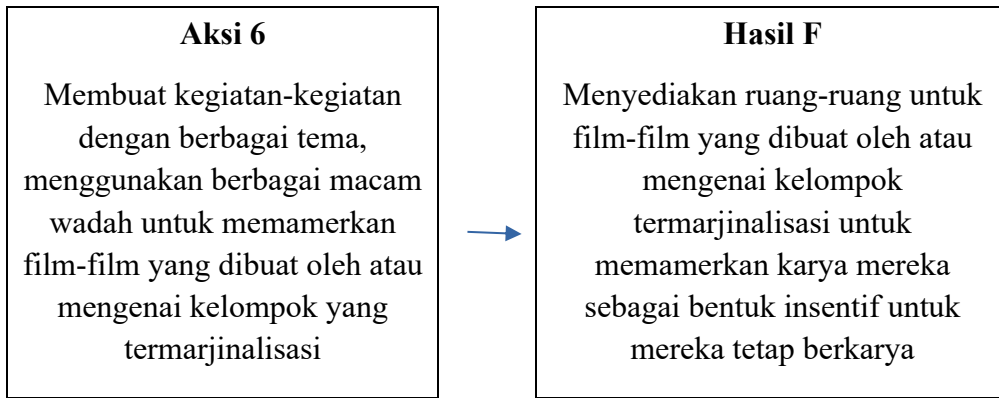
Ada usaha terkoordinasi dari asosiasi-asosiasi profesi perfilman Indonesia untuk mengadvokasi kondisi kerja

Sasaran I

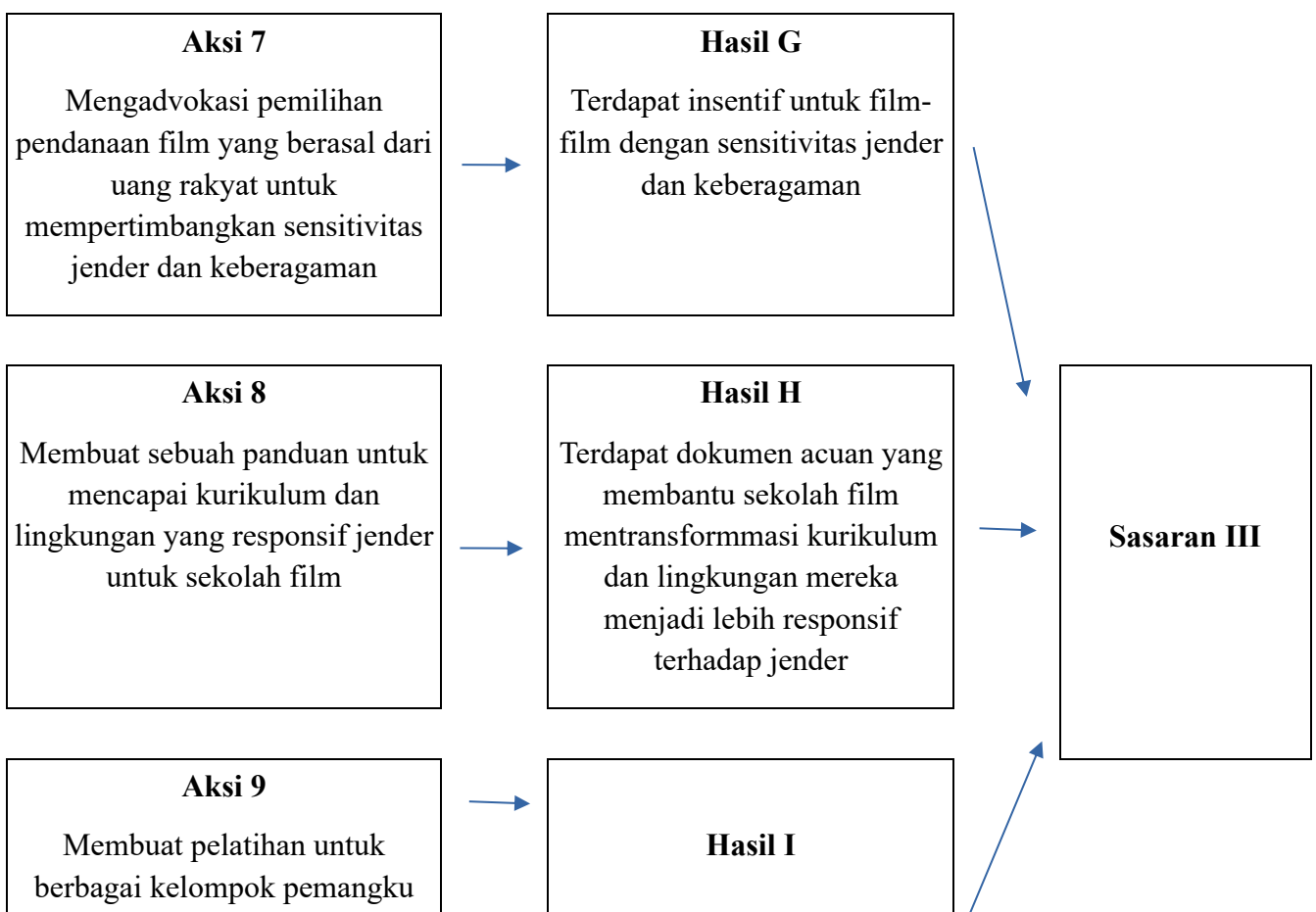


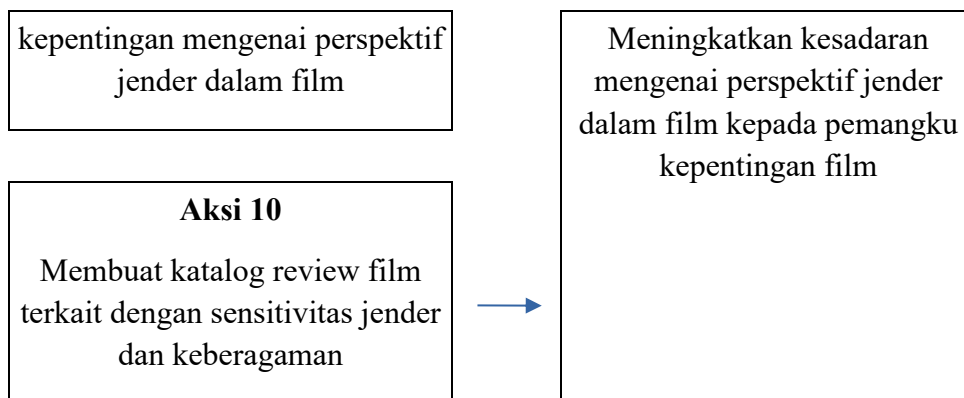
Sementara untuk sasaran kedua yang merupakan pendorongan pada jender termarginalisasi dan kelompok termarginalisasi lainnya untuk berpartisipasi dalam perfilman, kami merekomendasikan hal ini untuk dicapai melalui tiga kegiatan yang terkait pada perlakuan database untuk menjamin visibilitas dari ketimpangan apapun yang masih ada dan menyediakan ruang-ruang baru bagi pembuat film baru untuk belajar dan menampilkan karya mereka.





Sasaran ketiga yang berfokus pada isi film, akan didapatkan sebagian besar melalui pendidikan film yaitu dengan mentransformasi pendidikan formal film menjadi lebih responsif terhadap jender dan juga dengan intervensi melalui pelatihan informal yang ditargetkan kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti komunitas film, dsb.





Bab berikutnya akan membicarakan lebih mengenai implementasi aksi-aksi ini dan pemangku kepentingan mana yang kami pikir paling cocok untuk melakukan aksi-aksi tersebut

## Identifikasi Pemangku Kepentingan untuk Implementasi Rencana Aksi yang Direkomendasikan

Di bawah ini kami akan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memimpin aksi-aksi yang telah kami rekomendasikan. Kami akan merekomendasikan beberapa pihak yang berbeda yang sesuai untuk memimpin tiap aksi. Akan tetapi, institusi donor dan institusi pemerintah yang memiliki pendanaan adalah pemangku kepentingan penting untuk tiap aksi untuk menutup biaya penerapannya.

<b>Aksi 1</b>	Membuat sebuah panduan praktik terbaik yang mendefinisikan kondisi kerja yang ideal, aman dan inklusif bagi seluruh pekerja termasuk untuk kelompok yang rentan dan termarginalisasi serta merumuskan strategi untuk perbaikan kebijakan ketenagakerjaan perfilman melalui sebuah proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Pelaksana: Badan Perfilman Indonesia
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Kami merumuskan rekomendasi ini berdasarkan masukan dari FGD yang kami lakukan bersama Badan Perfillman Indonesia. Karena sifatnya yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, kami mempertimbangkan bahwa Badan Perfilman Indonesia akan menjadi pemangku kepentingan yang paling sesuai untuk memimpin kegiatan ini sebagai sebuah lembaga yang memiliki kombinasi yang tepat dari otoritas, representasi, dan jaringan untuk dapat menjalankannya secara efektif.

Kementerian Tenaga Kerja dapat dilibatkan untuk mendukung kegiatan ini begitupun juga dengan pihak lain seperti Komnas Perempuan dan lain-lain. Kemitraan dengan rumah produksi atau kegiatan perfilman lain juga dibutuhkan untuk menguji coba panduannya. Untuk membuat panduan ini kami merekomendasikan beberapa tahap dalam implementasinya:

**Pertama**, lakukan **penelitian** yang akan memberikan data-data yang membantu untuk membuat perubahan ke arah kondisi kerja perfilman Indonesia yang lebih inklusif bagi semua jender dan kelompok marjinal lainnya. Beberapa jenis penelitian bisa jadi dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kerja di perfilman Indonesia dan bagaimana hal itu menghambat kelompok marjinal untuk berpartisipasi dalam ketenagakerjaan perfilman dengan rekomendasi untuk bagaimana memperbaikinya. KAFEIN (Asosiasi Pengkaji Film Indonesia), peneliti independen yang fokus pada perempuan dalam perfilman Indonesia dan peneliti lain yang dianggap sesuai dengan topik akan menjadi kelompok yang terbaik untuk diundang melakukan penelitian ini. Topik-topik penelitian yang mungkin dilakukan:

- Mengumpulkan data kualitatif dari pekerja film Indonesia dari berbagai posisi mengenai kondisi kerja dan mencari masukan mereka mengenai apa yang bisa menjadi kondisi kerja ideal bagi mereka
- Sebuah tinjauan terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia dan hukum serta konvensi internasional yang berlaku bagi praktik kerja perfilman Indonesia
- Studi perbandingan dengan praktik kerja film di negara-negara lain
- Praktik rekrutmen yang terjadi di industri dan kegiatan perfilman dengan rekomendasi untuk memperbaikinya

**Kedua**, memfasilitasi sebuah **kelompok kerja** yang bertujuan untuk mendefinisikan kondisi kerja yang ideal, aman dan inklusif bagi seluruh pekerja termasuk mereka yang dari kelompok rentan dan termarjinalisasi serta merumuskan strategi untuk perbaikan kebijakan ketenagakerjaan film. Kelompok kerja ini sebaiknya melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan, dengan perwakilan-perwakilan dari pemangku kepentingan film, pemangku kepentingan terkait hak-hak pekerja dan kebijakan ketenagakerjaan film. Kelompok ini harus terdiri dari mereka yang memiliki kepentingan terbesar dan/atau memiliki pengetahuan terbesar mengenai masalah. Konsultan profesional dapat dipekerjakan untuk mengatasi kurangnya pengetahuan pada bidang-bidang tertentu. Penelitian yang berasal dari tahap sebelumnya sebaiknya menjadi dasar bagi diskusi yang dilakukan kelompok ini. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dapat memakan waktu berminggu-minggu dengan banyak pertemuan, termasuk melakukan konsultasi publik dan dapat dibagi-bagi menjadi beberapa klaster jika diperlukan.

Hasil kerja kelompok ini berupa sebuah panduan praktik terbaik yang akan membantu setiap produksi dan kegiatan perfilman untuk menciptakan tempat kerja yang ideal, aman dan inklusif. Panduan praktik terbaik ini dapat digunakan secara sukarela sebagai acuan bagi produser film yang ingin mencapai lingkungan yang ideal dan inklusif dalam produksi film mereka. Panduan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk strategi perbaikan kebijakan ketenagakerjaan film.

Panduan ini sebaiknya membahas hal-hal berikut meskipun bisa memasukan hal-hal lain juga:

- Bagaimana membuat pengamanan untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja seperti dengan adanya kebijakan perusahaan, klausa kontrak lengkap dengan contoh kontrak disediakan, prosedur pengajuan keluhan, dsb

- Bagaimana melindungi hak reproduksi pekerja seperti panduan mengenai aturan cuti haid, cuti hamil atau kemungkinan untuk adanya dukungan pengasuhan anak, dsb
- Praktik rekrutmen yang adil dan inklusif
- Aturan mengenai jam kerja, upah dan kebijakan mengenai serikat
- Bagaimana mengakomodasi pekerja dengan disabilitas

**Ketiga**, lakukan **proyek percontohan** dengan beberapa rumah produksi atau kegiatan perfilman untuk mengujicoba di lapangan penerapan dan efektivitas panduan praktik terbaiknya. Panduan praktik terbaik sebaiknya diujicobakan untuk menjamin bahwa panduan tersebut dapat diterapkan dan efektif. Ini membutuhkan kemitraan dengan beberapa rumah produksi atau kegiatan perfilman yang bersedia untuk berpartisipasi menerapkan panduan dalam pekerjaan mereka. Perlu ada pencatatan yang komprehensif mengenai bagaimana penerapan berlangsung begitupun juga catatan-catatan tentang bagian-bagian apa yang harus diperbaiki. Umpan balik ini kemudian perlu didiskusikan lagi oleh kelompok kerja dan untuk dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap panduannya.

**Sebagai tambahan**, untuk meningkatkan kesadaran dan untuk meningkatkan kemungkinan panduannya digunakan oleh para pemangku kepentingan, perlu **publikasi** proses dan hasil kegiatan ini. Sebuah rencana komunikasi dengan tim komunikasi serta jalur-jalurnya perlu disiapkan sebelum proyek berjalan untuk menjamin bahwa capaian-capaian penting dilaporkan secara efektif.

<b>Aksi 2</b>	Memfasilitasi pertemuan antara asosiasi-asosiasi profesi perfilman Indonesia untuk mendiskusikan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mencapai lingkungan kerja yang ideal, aman dan inklusif bagi pekerja film	Pelaksana: Badan Perfilman Indonesia
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Berdasarkan diskusi dengan anggota pengurus Badan Perfilman Indonesia, jelas bahwa asosiasi profesi semestinya mengambil peran sentral dalam masalah ini. Kami mempertimbangkan, lagi-lagi, BPI lah yang memiliki kapasitas untuk memanggil asosiasi-asosiasi perfilman untuk bertemu dan membahas tindakan apa yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mengadvokasi dan mendukung lingkungan kerja yang ideal, aman dan inklusif bagi pekerja film. Terdapat 9 asosiasi profesi perfilman, masing-masing mewakili profesi yang berbeda dalam perfilman: sutradara, aktor, penulis, editor, audio, casting, perancang produksi, produser dan sinematografer. Sebagai tambahan, “Arts for Women” adalah sebuah asosiasi feminis untuk bagi pekerja seni dan aktivis perempuan yang menyediakan tempat yang aman dan nyaman, dan juga perlindungan dan advokasi bagi pekerja seni perempuan. Karena asosiasi-asosiasi ini merupakan organisasi yang mewakili pekerja film dan pekerja film/seni perempuan pada saat ini, maka mereka adalah pemangku kepentingan kunci yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan jika mereka mengorganisasikan sebuah usaha yang terkoordinasi.

<b>Aksi 3</b>	Membuat sebuah organisasi untuk perfilman Indonesia yang menyediakan perlindungan dan dukungan bagi para penyintas kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dalam produksi atau kegiatan perfilman Indonesia	Pelaksana: Badan Perfilman Indonesia
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Aksi ini diusulkan oleh Nia Dinata, salah satu produser terkenal di Indonesia yang peduli terhadap masalah ini. Usulannya adalah untuk membuat sebuah kelompok dukungan untuk para penyintas kekerasan seksual di perfilman Indonesia. Ada contoh sebuah organisasi penyintas kekerasan seksual seperti Lentera Sintas Indonesia yang membuka sebuah ruang aman bagi para penyintas untuk berbagi dan menyembuhkan trauma mereka bersama-sama. Pendekatan serupa dapat digunakan khusus untuk penyintas kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam produksi atau kegiatan perfilman. Karena organisasi ini khusus untuk perfilman Indonesia, kami berpikir itu akan lebih memberikan rasa dekat sehingga dapat lebih mudah menjangkau orang-orang yang membutuhkannya. Organisasi ini juga dapat memberikan dukungan lebih jauh seperti menyediakan jasa konseling (seperti yang dilakukan Yayasan Pulih), pendampingan hukum jika dibutuhkan, dan juga kegiatan penjangkauan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pembentukan organisasi ini dapat difasilitasi oleh BPI didukung oleh lembaga pemerintahan seperti Komnas Perempuan. Organisasi bisa saja berupa unit di bawah organisasi yang sudah ada yang relevan dengan isu; Lentera Sintas Indonesia atau Yayasan Pulih yang disebut di atas atau asosiasi multi-profesi yang besar seperti Karyawan Film Televisi (KFT) bisa menjadi pilihan. Akan tetapi, penting untuk pertama-tama berkamuikasi dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan penyintas, orang-orang yang dipercaya oleh penyintas, dan bahkan para penyintas itu sendiri untuk memulai organisasi ini. Dalam kasus ini, kami merekomendasikan berkolaborasi dengan organisasi perlindungan perempuan Arts for Women, Lentera Sintas Indonesia dan Yayasan Pulih, dengan koordinasi bersama Komnas Perempuan.

<b>Aksi 4</b>	Memperluas kerangka kerja untuk data terpilah jender perfilman Indonesia untuk memasukan nuansa terkait dengan kategori-kategori marjinalisasi lainnya dan memelihara, memperbaharui dan mempublikasikan data tersebut	Pelaksana: KAFEIN
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Agar menjadi benar-benar inklusif, kita perlu data yang menunjukkan interseksionalitas antara jender dan kategori-kategori marjinalisasi lainnya seperti disabilitas, minoritas etnik, kelas sosial-ekonomi dan sebagainya. Analisis statistik juga dapat dibuat menjadi lebih komprehensif untuk memasukan misalnya proporsi statistik terhadap seluruh populasi atau angkatan kerja atau industri-industri lain.

Data terpilah-jender mestinya tersedia dalam sebuah website untuk akses publik sebagai pengetahuan publik yang dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Ini dapat dilakukan oleh KAFEIN melalui pemeliharaan website terpisah atau disatukan dengan katalog film Indonesia yang sudah ada melalui kemitraan.

<b>Aksi 5</b>	Membuat lokakarya kolaborasi dengan calon-calon pembuat film dari jender termarginalisasi atau kelompok marjinal lainnya	Pelaksana: Asosiasi- asosiasi perfilman
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Kolaborasi adalah sebuah cara yang realistis untuk mentransfer pengetahuan dan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perfilman dan juga memungkinkan kisah mereka diceritakan dengan cara yang tulus dan berarti. Donor atau pendanaan pemerintah dapat mendanai produksi film yang menampilkan kolaborasi antara pembuat film yang mapan dengan orang-orang dari kelompok marjinal atau jender marjinal. Bisa juga ada program mentoring misalnya antara produser/sutradara/penulis naskah perempuan yang sukses dengan bakat-bakat baru untuk memupuk regenerasi untuk menghindari disparitas yang lebih jauh. Meskipun terbatas, program-program seperti itu sudah ada dan telah dilakukan oleh berbagai organisasi perfilman, jadi ada berbagai pilihan kolaborator, praktik terbaik dan pengalaman yang dapat dipelajari. Kegiatan ini dapat dipimpin oleh asosiasi perfilman apapun seperti KAFEIN atau ASPROFI.

<b>Aksi 6</b>	Membuat kegiatan-kegiatan dengan berbagai tema, menggunakan berbagai macam wadah untuk memamerkan film-film yang dibuat oleh atau mengenai kelompok yang termarginalisasi	Pelaksana: Badan Perfilman Indonesia
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Beberapa event dapat dibuat dengan pemrograman yang fokus pada kelompok marjinal, pada beberapa platform yang berbeda seperti festival film, webisode, atau penayangan televisi. Adanya wadah-wadah digital seperti YouTube, Vuu, Iflix, Go Play, Bioksop Online, Mubi, Disney Plus, Cathcplay, Vidsee, Netflix dan lainnya telah membuka kesempatan yang besar untuk membuat lebih banyak event tayangan. Presentasi dari Ratna Erika M. Suwarno dalam Konferensi Virtual menunjukkan bahwa wadah seperti ini dapat menyediakan cara untuk memajukan karir seorang pembuat film, dalam kasus ini karir seorang sutradara perempuan. Maka dari itu, kita dapat membuat event-event melalui wadah ini dengan tema-tema yang merayakan misalnya film-film yang dibuat sutradara perempuan, atau film-film yang dibuat oleh atau mengenai orang-orang dengan disabilitas, bisa juga tema geografis seperti provinsi atau kelompok etnis di Indonesia. Hal penting di sini adalah tema-tema tersebut mendorong keberagaman dan menyediakan akses mereka yang tadinya tidak memiliki akses untuk penayangan yang menjangkau luas dan maka dari itu mendorong mereka untuk membuat film dengan tema-tema tersebut.

Festival-festival seperti itu cukup umum di masa lalu, khususnya pada momen-momen setelah reformasi politik. Akan tetapi adanya krisis ekonomi di akhir tahun 2000an dan naiknya sentimen-sentimen anti-minoritas menambah tekanan pada festival-festival tersebut. Akan tetapi, pemrogram, kurator dan manajernya masih jika kita butuh mereka untuk berkontribusi atau berbagi pengalaman. Kita perlu menambahkan event-event seperti itu dan bisa mengintegrasikannya dengan festival film



dengan isu khusus seperti urbanisasi, lingkungan, buruh, anti-korupsi, kelompok etnik, bahasa lokal, dsb.

<b>Aksi 7</b>	Mengadvokasi pemilihan pendanaan film yang berasal dari uang rakyat untuk mempertimbangkan sensitivitas jender dan keberagaman	Pelaksana: Badan Perfilman Indonesia
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Setiap tahun Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan pendanaan untuk pembuatan film. Meskipun sekarang Pusbang Film telah digantikan dengan Direktorat Film, Musik dan Media Baru, kami membayangkan bahwa masih akan ada dana untuk pembuatan film di masa depan. Pemerintah lokal provinsi juga memiliki program pendanaan film seperti provinsi Yogyakarta yang memiliki “dana istimewa” untuk mendukung seniman lokal (dan telah mendanai film “Tilik” yang kontroversial dalam persoalan jender). Berdasarkan FGD kami dengan anggota pengurus BPI, kami pikir penting untuk mengadvokasi kriteria pemilihan dan kurator dari pendanaan ini untuk mempertimbangkan sensitivitas jender dan keberagaman. Advokasi dapat dipimpin oleh BPI didukung oleh beberapa Komisi Perfilman Lokal sebagai organisasi yang fokus pada promosi daerah spesifik untuk mendapatkan keuntungan dari produksi film, Bisa juga ada program kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik dan memotivasi Kemendikbud dan pemerintah daerah untuk membuat perubahan-perubahan ini. Ini merupakan momentum tepat untuk melakukan kampanye ini dengan film “Tilik”<sup>1</sup> masih dibicarakan secara luas oleh masyarakat karena persoalan jendernya.

<b>Aksi 8</b>	Membuat sebuah panduan untuk mencapai kurikulum dan lingkungan yang responsif jender untuk sekolah film	Pelaksana: PROSFISI
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Pentingnya pengarusutamaan jender dalam pendidikan film telah disorot oleh presentasi Dr. Evi Eliyanah di Konferensi Virtual. Administrator-administrator program studi film di sekolah-sekolah dan universitas-universitas seni memperbaharui kurikulumnya sepanjang tahun, dan mereka mendiskusikannya dengan kolega-kolega mereka dari institusi lain di Asosiasi Program Studi Film dan Televisi (PROSFISI). BPI dapat mendorong dibuatnya panduan untuk proses seperti itu, dirancang untuk membantu mencapai kurikulum dan lingkungan yang responsif jender untuk sekolah film. Panduan ini dapat sejajar dengan panduan untuk isu-isu progresif lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pembuat-pembuat film dengan pernyataan budaya seperti lingkungan, anti-korupsi dan sebagainya. BPI dapat bertindak sebagai penyelenggara untuk program pembuatan panduan itu, KAFEIN dapat menyediakan pengetahuan mengenai isu jender, dan PROSFISI yang memanggil anggotanya untuk memanfaatkan panduan ini.

Kemendikbud dapat juga dilibatkan untuk memberikan semacam pengesaahan dan kemungkinan di masa depan menetapkan sebuah kebijakan yang mendukung implementasi dari panduan yang

---

1 Tonton “Tilik” di : [https://www.youtube.com/watch?v=GAyvgz8\\_zV8](https://www.youtube.com/watch?v=GAyvgz8_zV8)

dihasilkan. Dukungan dari Kemendikbud berguna untuk menjaring sekolah-sekolah film dan mengintervensi kurikulum mereka. Kami pikir ini dapat dilakukan oleh beberapa individu di perfilman Indonesia yang memiliki perhatian dan ingin mendorong maju aksi ini dalam mencapai kesetaraan jender dalam perfilman Indonesia. Dukungan dari BPI, PROSFISI dan organisasi donor bisa sangat berguna sebagai pengaruh advokasi. Debat akhir-akhir ini mengenai film “Tilik”<sup>2</sup> bisa memberikan sebuah momentum untuk mendorong agenda ini.

Metodologi pengembangan panduan ini bisa disamakan dengan aksi 1 yang mengembangkan panduan untuk kondisi kerja. BPI dan PROSFISI dapat memfasilitasi sebuah kelompok kerja yang terdiri dari administrator prodi film dan/atau dosen-dosen film dan kemudian melibatkan beberapa sekolah film untuk menjadi proyek percontohan untuk panduan ini.

<b>Aksi 9</b>	Membuat pelatihan untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan mengenai perspektif jender dalam film	Pelaksana: BPI, KAFEIN, ASPROFI
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Ini merupakan pelatihan mengenai perspektif jender dalam film, namun bukan untuk mahasiswa film namun untuk profesional. Seperti aksi 8, BPI dapat bertindak sebagai panitia untuk program pelatihan sementara KAFEIN dapat menyediakan keahlian dalam isu jender. Pelatihan ini dapat menggunakan aksi 8 untuk mengembangkan kurikulum pelatihan, dan asosiasi-asosiasi akan menggunakan panduan ini untuk membuat pelatihan spesifik untuk anggota-anggota mereka.

<b>Aksi 10</b>	Membuat katalog review film terkait dengan sensitivitas jender dan keberagaman	Potential Lead: KAFEIN
----------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Ide ini datang dari FGD kami dengan dosen-dosen film dimana Nan Achnas bertanya apakah sudah ada studi terhadap film-film Indonesia terkait dengan sensitivitas jender dalam isinya. Sebuah website blog independen dapat dibuat untuk secara rutin menerbitkan ulasan film Indonesia yang memasukan ulasan terhadap sensitivitas jender dan keberagamannya. Blog ini dapat dibuat menggunakan model website yang sudah ada seperti <https://www.mediaiversityreviews.com> meskipun tentu saja harus diadaptasi untuk menyesuaikan dengan film dan penonton Indonesia. KAFEIN atau organisasi lain yang tertarik dapat membuat website dan menyewa beberapa kontributor untuk memulai. Ulasan haruslah berkualitas tinggi dan berbicara mengenai isu umum juga agar dapat menarik penonton umum dan bukan hanya relung kecil penonton yang sudah tertarik pada isu jender dan keberagaman. Meskipun memiliki keterbatasan, “tes” yang ada yang sudah dipakai oleh penonton global seperti tes Bechdel atau tes Mako Mori bisa jadi berguna untuk mengidentifikasi representasi dan isu jender meskipun tentu saja ulasan harus mengulas jauh lebih banyak dari itu.

2 Diskusi tentang “Tilik” dan krisis jender ditulis oleh anggota riset kami, Dr. Evi Eliyanah : <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/tilik-and-the-gender-order-crisis/>

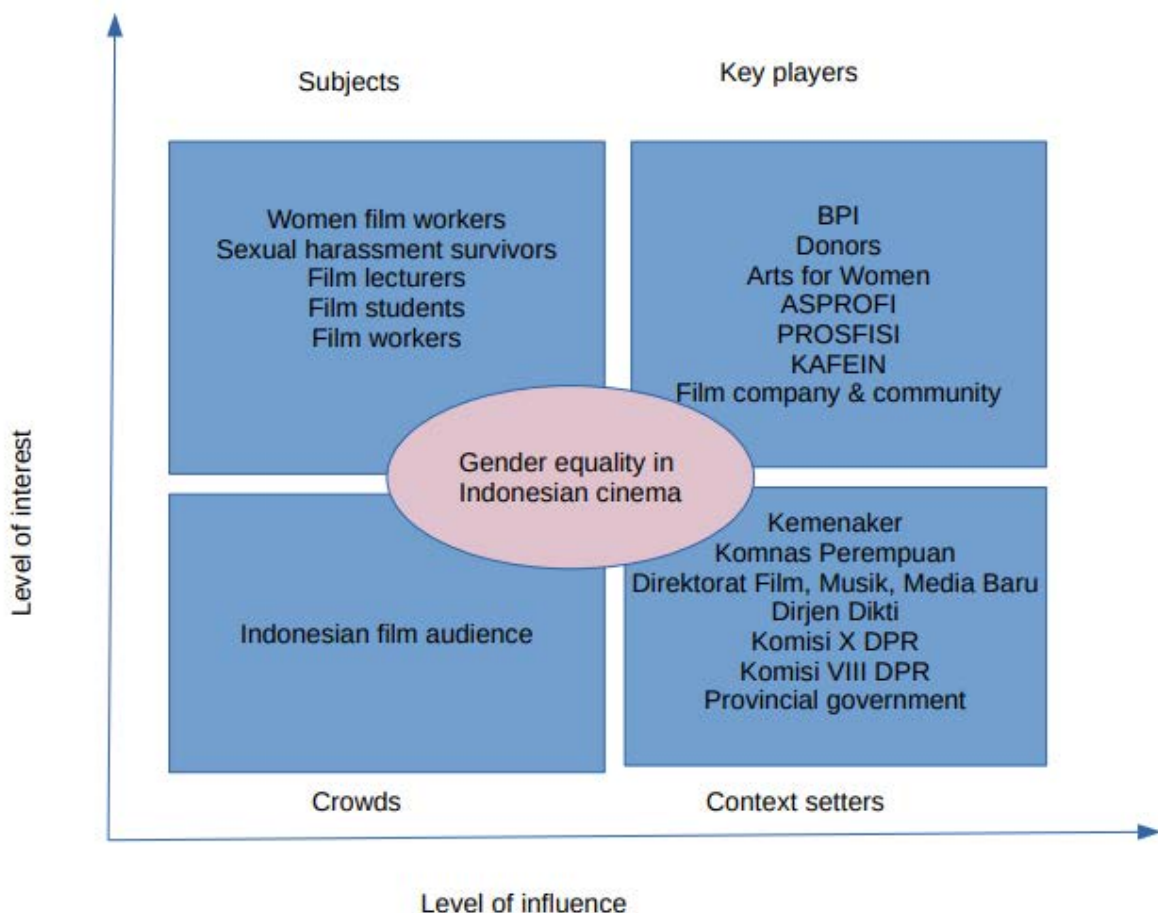
## Analisis Pemangku Kepentingan

Di bawah ini kami membuat analisis pemangku kepentingan yang sudah kami identifikasi di bab sebelumnya.

No.	Pemangku Kepentingan	Ketertarikan	Pengaruh
1.	Badan Perfilman Indonesia (BPI)	Tinggi	Tinggi
2.	Asosiasi Profesi Perfilman (ASPROFI)	Tinggi Sedang	Tinggi
3.	Asosiasi Program Studi Film dan Televisi (PROSFISI)	Tinggi Sedang	Tinggi
4.	Perusahaan & Komunitas Film	Tinggi Sedang	Tinggi
5.	Art for Women	Tinggi Sedang	Tinggi
6.	Lembaga donor	Tinggi	Tinggi
7.	KAFEIN (Asosiasi Pengkaji Film Indonesia)	Tinggi Sedang	Tinggi
8.	Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)	Sedang Rendah	Tinggi
9.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Sedang Rendah	Tinggi
10.	Direktorat Film, Musik dan Media Baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sedang Rendah	Tinggi
11.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rendah	Tinggi

12.	Komisi X (pembuat konstitusi film) – Dewan Perwakilan Rakyat	Rendah	Tinggi
13.	Komisi VIII (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) – Dewan Perwakilan Rakyat	Rendah	Tinggi
14.	Pemerintah Daerah	Sedang Rendah	Tinggi
15.	Pekerja film perempuan	Tinggi	Rendah
16.	Penyintas kekerasan seksual dalam perfilman Indonesia	Tinggi	Rendah
18.	Pengajar film	Tinggi	Sedang Rendah
18.	Mahasiswa film	Tinggi Sedang	Rendah
19.	Pekerja film secara umum	Tinggi Sedang	Rendah
20.	Penonton film Indonesia	Rendah	Rendah

Berdasarkan analisis di atas kami meletakkannya dalam matriks ketertarikan-pengaruh sebagai berikut



Analisis ini menunjukkan bahwa pemain utama untuk rencana aksi ini adalah Badan Perfilman Indonesia yang memiliki otoritas untuk memimpin dan mendukung seluruh kegiatan yang direkomendasikan. Kami juga menganggap donor sebagai pemain kunci yang mampu mendorong pihak-pihak lain untuk menerapkan aksi dengan menyediakan pendanaan yang dibutuhkan. Sementara asosiasi-asosiasi adalah pemangku kepentingan yang memiliki jaringan untuk melibatkan dan mewakili subyek target untuk rencana aksi ini. Perusahaan dan komunitas film adalah yang akan memanfaatkan dan menerapkan banyak dari hasil-hasil kerja aksi yang kami rekomendasikan.

Pembuat konteks kebanyakan adalah lembaga pemerintah yang merumuskan dan mengeluarkan kebijakan dan juga merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan. Subyek isu ini adalah pekerja film perempuan dan penyintas kekerasan seksual yang memiliki kepentingan terbesar namun hanya sedikit pengaruh. Pengajar film dapat berpotensi menjadi agen perubahan dalam kampus masing-masing namun memiliki otoritas terbatas. Mahasiswa film yang akan menerima pendidikan dan menjadi sumber daya manusia untuk produksi film juga adalah subyek. Pekerja film secara umum akan juga menerima manfaat dari aksi yang kami rekomendasikan meskipun kepentingan mereka tidak setinggi pekerja film perempuan. Penonton film Indonesia adalah kerumunan yang harus dilibatkan secara minimal namun strategis. Maka dari itu berikut ini adalah rekomendasi untuk strategi pelibatan pemangku kepentingan

<p><b>Pemain kunci:</b> BPI, donors, Arts for Women, ASPROFI, PROSFISI, KAFEIN, perusahaan dan komunitas film</p>	<p>Para pemain kunci adalah mereka yang akan mengimplementasikan rencana aksi. Kegiatan ini dilakukan dalam koordinasi dengan BPI dan maka dari itu kami berharap BPI akan mengambil rencana aksi ini dan bekerja untuk mengamankan pendanaan dan menerapkannya. Lembaga donor seperti UNESCO dan lainnya dapat menyediakan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Arts for Women, ASPROFI, PROSFISI, dan KAFEIN. Perusahaan dan komunitas film perlu dilibatkan secara dekat dalam proses implementasi agar mereka lebih semangat untuk benar-benar mengaplikasikan hasil dari rencana aksi. Komunitas film lokal juga harus dilibatkan untuk mendukung kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah.</p>
<p><b>Pembuat konteks:</b> Kemenaker, Komnas Perempuan, Direktorat Film, Musik dan Media Baru, Dirjen Dikti Depdikbud, Komisi X DPR, Komisi VIII DPR, pemerintah daerah</p>	<p>BPI dan organisasi lain yang akan melakukan rencana aksi harus menjadwalkan pertemuan untuk advokasi dengan para pembuat konteks yang relevan, mengundang mereka ke pertemuan dan event dan menjaga arus informasi kepada mereka mengenai proses dan kemajuan kegiatan. Jika memungkinkan juga mendapatkan dukungan dan pengesahan kegiatan yang dilakukan.</p>
<p><b>Subyek:</b> pekerja film perempuan, penyintas kekerasan seksual, dosen film, mahasiswa film, pekerja film</p>	<p>Untuk mengelola subyek, penting untuk selalu mendengarkan suara mereka. Dalam salah satu rencana aksi kami merekomendasikan untuk melakukan penelitian kualitatif secara khusus untuk mencari masukan mereka mengenai isu ini. Kami juga merekomendasikan untuk membuka jalur komunikasi yang memungkinkan mereka untuk selalu memberikan umpan balik atau melaporkan keluhan.</p>

<b>Kerumunan:</b> penonton film Indonesia	Untuk melibatkan mereka secara strategis, kita dapat menggunakan publikasi melalui media massa dan media sosial untuk menginformasikan mereka mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemajuannya dan pencapaiannya.
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Conclusion

Data terpilah-jender mengenai perfilman Indonesia jelas menunjukkan adanya ketimpangan dalam partisipasi perempuan dalam perfilman Indonesia. Dimana ada partisipasi perempuan, biasanya hanya berpusat pada beberapa posisi yang fleksibel seperti penulis naskah dan artistik. Sementara di sekolah film kesenjangan tidak begitu besar, di industri angka kesenjangan menjadi besar. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang menyelesaikan sekolah film memutuskan untuk tidak bergabung dengan industri. Kami merespon data ini dengan merekomendasikan aksi-aksi yang dapat dilakukan pemangku kepentingan film Indonesia untuk mengubah situasi ini. Kami mengidentifikasi tiga isu utama yang harus ditangani: pertama memperbaiki kondisi kerja dalam perfilman Indonesia, kedua mendorong partisipasi perempuan dan kelompok marjinal lainnya dan ketiga mengintegrasikan perspektif jender dalam pembuatan film. Kami telah merekomendasikan 10 aksi yang dapat diambil untuk menyelesaikan tiga isu utama yang telah disebut dan juga merekomendasikan strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rencana aksi ini untuk meningkatkannya atau sekedar mengekspresikan dukungan terhadap rencana aksi ini melalui e-mail kami [kafein.id@gmail.com](mailto:kafein.id@gmail.com). Kami membuka periode konsultasi dari tanggal 21-27 September 2020.

